

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pacitan terkenal akan keindahan alamnya. Hamparan pegunungan hijau, ratusan gua indah dan dipadu dengan pantai yang menawan tidak salah jika mendapat julukan sebagai *paradise of Java*. Selain itu Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan

(Kiranayanti dan Erawati, 2016). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Ariesta, 2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat dapat diimplementasikan di daerah untuk menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Halim, 2007).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, karena dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjelaskan laporan keuangan daerah yang berkualitas membutuhkan penerapan sistem akuntansi di dalam penyusunannya. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pemendagri No. 13 Tahun 2006). Selain itu, hal yang mendasar dan penting untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015). Kompetensi aparatur yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 69 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 ayat (1) tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketidak pahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (Diklat)

sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan (Andini dan Yusrawati, 2015). Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kompetensi aparatur yang terdidik diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan daerah berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembenahan pengelolaan keuangan yang masih buruk, baik di pemerintah pusat maupun daerah tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru dilingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan Pegawai organisasi yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Melalui Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan didukung peningkatan kompetensi pegawai baik pada tingkat sistem, kelembagaan, maupun individu khususnya bagian akuntansi diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya good governance.

Alasan fenomena untuk penelitian ini adalah supaya bisa mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan dan sistem akuntansi pemerintahan yang berada di daerah masing-masing kabupaten atau kota

madya, melalui tingkatan kompetensi pegawai yang bertanggungjawab langsung dengan laporan keuangan.

Hasil Penelitian yang dilakukan Kiranayanti dan Erawati (2016), tentang pegawai organisasi, sistem pengendalian intern dan pemahaman basis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Badung, Denpasar. Penelitian Andini dan Yusrawati (2015), tentang kompetensi pegawai organisasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan uraian tersebut dan dengan adanya fenomena baru di media massa, yaitu munculnya iklan dan banner di tepi jalan raya atas ucapan selamat kepada pemerintah daerah kabupaten atas di perolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan yang di lakukan di oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan keuangan di berbagai daerah termasuk di pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih luas dengan judul

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI PEGAWAI ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (study empiris pada OPD Kabupaten Pacitan).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah tahun 2021?
2. Apakah kompetensi pegawai organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah tahun 2021 ?
3. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah tahun 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- b. Mengetahui pengaruh kompetensi pegawai organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- c. Mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah pustaka dan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai OPD beserta berbagai aspek yang menyertainya termasuk mengenai kualitas laporan keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai salah satu bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan terkait penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai OPD sehingga akan memberikan manfaat untuk perbaikan secara berkala.

3. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai OPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi maupun kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan pada bidang ini dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan.